

LKPj

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN



**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Tahun 2022

**Jl. R.E. Martadinata No. 9 Benteng 92812,
Kab. Kepulauan Selayar, Prov. Sulawesi Selatan
Email : dishubkepselayar@gmail.com**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Perhubungan, Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) adalah laporan berupa informasai penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran. Hal tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Perhubungan, Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 disusun sebagai bantuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Perhubungan kepada Bupati Kepulauan Selayar terkait pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan selama tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar. Penyampaian laporan ini pada akhirnya juga merupakan perwujudan tanggung jawab kepada masyarakat dan tertib pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan dan sekaligus dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan kegiatan pemerintahan disamping juga sebagai bahan pengawasan dan pengendalian.,

Demikian laporan yang ini disusun dengan harapan dapat membantu dalam penyusunan LPPD Bupati Kepulauan Selayar tahun 2022, dimana tahun ini merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD 2021-2025.

Benteng, 30 Januari 2023

Kepala Dinas

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
<u>BAB I</u> PENDAHULUAN	3
1.1. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar.....	3
1. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar	4
2. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan dan Jumlah Pejabat Struktural Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar	6
<u>BAB II</u> HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN . 9	
2.1. Capaian Kinerja Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	9
2.2. Kebijakan Daerah (Perda, Perbub, dan Keputusan Bupati) yang Diinisiasi Oleh Dinas Perhubungan dan Ditetapkan Oleh Kepala Daerah	42
2.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2021	43
<u>BAB III</u> CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	47
3.1. Tugas Pembantuan dan Penugasan yang Dilaksanakan.....	47
3.2. Hambatan-Hambatan	47
<u>BAB IV</u> PENUTUP	48

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar

Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut Dinas perhubungan merupakan salah satu perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang termasuk dalam Tipe B.

Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar beralamat di Jalan R.E. Martadinata No. 9 Benteng, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, kode pos 92812, memiliki alamat email dishubkepselayar@gmail.com dan akun social media instagram @dishubselayarkab. Dinas Perhubungan terletak pada titik koordinat -6.1186318 Bujur Timur dan 120.4574719 Lintang Selatan.



Foto Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar

1. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan tertuang dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

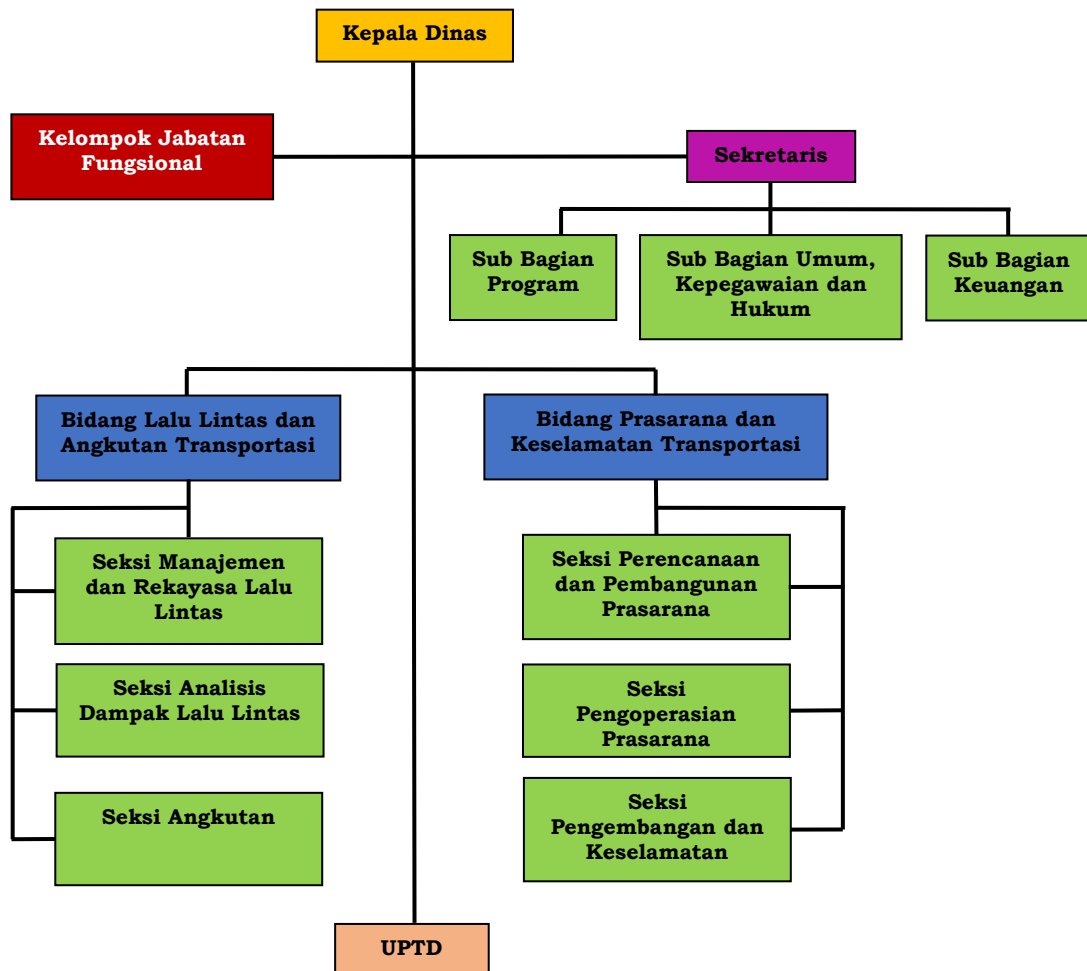
Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar, Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Subbagian Program
 - b. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum; dan
 - c. Subbagian Keuangan.

3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri atas :
 - a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - b. Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
 - c. Seksi Angkutan.
4. Bidang Prasarana dan Keselamatan, terdiri atas :
 - a. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana;
 - b. Seksi Pengoperasian Prasarana; dan
 - c. Seksi Pengembangan dan Keselamatan.
5. Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Fasilitas Pelayanan Darat Pelabuhan Pamatata;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Penyeberangan Pattumbukang;
 - c. Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal dan Perparkiran;
 - d. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Laut Lokal.

Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada gambar 1.1 sebagai berikut :

**Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021**



2. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan dan Jumlah Pejabat Struktural Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar

Sumber daya Aparatur Sipil Negara yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2022 dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai salah satu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebanyak 54 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 40 orang dan perempuan sebanyak 14 orang, adapun uraian ASN Dinas Perhubungan sesuai Kualifikasi Pendidikan,

Pangkat dan Golongan dan Jumlah Pejabat Struktural sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan menurut tingkat Pendidikan. Pada Tahun 2022 tercatat jumlah Pegawai lingkup Dinas Perhubungan menurut tingkat pendidikan sebagian besar atau 42,59% berpendidikan S1. Adapun jumlah dan komposisi menurut ASN Dinas Perhubungan berdasarkan tingkat pendidikan pada tahun 2022 seperti terlihat pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1 Jumlah ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2022

No.	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Ket
1	2	3	4	5	6
1.	S2	1	3	4	
2.	S1	16	7	23	
3.	D3	8	2	10	
4.	SLTA	15	2	17	
5.	SLTP				
6.	SD				
Total		40	14	54	

2. Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan menurut Pangkat dan Golongan Ruang. Pada Tahun 2022 tercatat jumlah Pegawai lingkup Dinas Perhubungan menurut Pangkat dan Golongan Ruang seperti terlihat pada tabel 1.2 berikut :

Tabel 1.2 Jumlah ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Menurut Kepangkatan Tahun 2022

No.	Golongan	Jumlah Pegawai		Jumlah	Ket.
		Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pembina Utama Muda	1	-	1	
2.	Pembina Tk. I	-	-	-	
3.	Pembina	1	1	2	

No.	Golongan	Jumlah Pegawai		Jumlah	Ket.
		Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)		
1	2	3	4	5	6
4.	Penata Tk. I	7	4	11	
5.	Penata	7	2	9	
6.	Penata Muda Tk. I	6	5	11	
7.	Penata Muda	9	1	10	
8.	Pengatur Tk. I	8	-	8	
9.	Pengatur	1	1	2	
10.	Pengatur Muda Tk. I	-	-	-	
11.	Pengatur Muda	-	-	-	
Total		40	14	54	

3. Kondisi Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan sesuai dengan jabatan struktural, seperti pada table berikut :

Tabel 1.3 Jumlah ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar yang Menduduki Jabatan Struktural Tahun 2022

No.	Eselon	Jumlah Pegawai		Ket.
		Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)	
1	2	3	4	5
1.	Eselon IIB (Kepala Dinas	1	-	
2.	Eselon IIIA (Sekretaris)	-	1	
3.	Eselon IIIB (Kepala Bidang)	1	1	
4.	Eselon IVA (Kepala Seksi/Kasubag./Kepala UPTD)	8	4	
5.	Eselon IVB (Kasubag. TU)	3	1	
Total		13	7	

Dari 18 (delapan belas) jabatan struktural yang ada pada Dinas Perhubungan terdapat satu jabatan yang kosong (tidak memiliki pejabat) yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.

BAB II

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.1. Capaian Kinerja Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

2.1.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Salah satu cara untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar adalah dengan melakukan pengukuran terhadap capaian indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Dari pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022, dapat dikatakan berjalan sesuai dengan perencanaan, hal ini tampak dari capaian indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan yang sebagian besar mencapai 100% atau sesuai target, dari 3 (tiga) program yang dilaksanakan, yaitu Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan indikator Kinerja Lalu lintas Kabupaten, serta Program Pengelolaan Pelayaran dengan indikator kinerja Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang Layak Fungsi.

Selain program Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar juga melaksanakan kegiatan sebanyak 11 kegiatan dan 33 Sub Kegiatan yang terdiri dari 5 (lima) kegiatan urusan penunjang pelaksanaan administrasi perkantoran dengan 24 sub kegiatan serta sebanyak 6 (enam) kegiatan urusan perhubungan dengan 9 (sembilan) sub kegiatan. Capaian kinerja program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya pemecahan permasalahan yang

dihadapi dalam upaya mewujudkan pencapaian kinerja yang telah ditargetkan terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.1.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022**

No	Urusan Pemerin tahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebija kan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
	Perhubu ngan	Dinas Perhubungan				9.691.946.221		9.221.086.491			
I			RKPD tahun 2022	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kinerja	100%	Kinerja	94,36%	1 Kurangnya armada transportasi laut menuju pulau-pulau	1 Koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pada level yang lebih tinggi dalam rangka pemenuhan armada transportasi ke wilayah kepulauan	
					Alokasi Anggaran (Rp)	6.121.673.121	Alokasi Anggaran (Rp)	5.929.439.553			
1			DPA Dinas Perhub ungan Tahun 2022	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kinerja	60 Poin	Kinerja	54,41 poin	2 Kurang memadainya sarana dan prasarana transportasi	2 Efektivitas dan efisiensi pengelolaan kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN	
					Alokasi Anggaran (Rp)	49.080.000	Alokasi Anggaran (Rp)	44.725.000			
1)				Penyusunan Dokumen	Kinerja	2 Dokumen	Kinerja	2 Dokumen	3 Prosentase pertumbuha n	3 Meningkatkan kapasitas	

LKPj 2022

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

No	Urusan Pemerin tahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebija kan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
				Perencanaan Perangkat Daerah	Alokasi Anggaran (Rp)	3.620.000	Alokasi Anggaran (Rp)	3.580.000	kendaraan tidak sebanding dengan prasarana yang ada	balai uji dan alat uji kendaraan	
2)				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kinerja	1 dokumen	Kinerja	1 dokumen	4 Rendahnya kesadaran pemilik kendaraan wajib uji untuk menguji kendaraann ya	4 Sinergitas dengan stakeholder dalam rangka meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas.	
					Alokasi Anggaran (Rp)	2.950.000	Alokasi Anggaran (Rp)	2.950.000			
3)				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Kinerja	1 dokumen	Kinerja	1 dokumen	5 Pola hidup masyarakat yang lebih suka menggunak an kendaraan pribadi seperti motor	5 Meningkatkan edukasi kepada masyarakat terutama pada siswa dan pelajar untuk menggunakan sarana dan prasarana transportasi umum	
					Alokasi Anggaran (Rp)	2.750.000	Alokasi Anggaran (Rp)	2.750.000			
4)				Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Kinerja	1 dokumen	Kinerja	1 dokumen	6 Kapasitas SDM dan kelembagaa n yang rendah	6 Peningkatan Kapabilitas SDM di bidang perhubungan	
					Alokasi Anggaran (Rp)	2.190.000	Alokasi Anggaran (Rp)	2.190.000			

LKPj 2022

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

No	Urutan Pemerin tahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebija kan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
5)				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kinerja	1 dokumen	Kinerja	1 dokumen	7 Adopsi pengetahua n dan teknologi sangat lambat	7 Pengembangan system informasi	
					Alokasi Anggaran (Rp)	2.350.000	Alokasi Anggaran (Rp)	2.350.000			
6)				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja	3 dokumen	Kinerja	3 dokumen			
					Alokasi Anggaran (Rp)	4.500.000	Alokasi Anggaran (Rp)	4.500.000			
7)				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kinerja	1 dokumen	Kinerja	1 dokumen			
					Alokasi Anggaran (Rp)	30.720.000	Alokasi Anggaran (Rp)	26.405.000			
2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kinerja	1 Laporan	Kinerja	1 Laporan			
					Alokasi Anggaran (Rp)	4.272.066.000	Alokasi Anggaran (Rp)	4.211.752.840			
1)				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kinerja	61 orang	Kinerja	54 orang			
					Alokasi Anggaran (Rp)	4.261.086.000	Alokasi Anggaran (Rp)	4.202.192.840			
2)				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kinerja	1 laporan	Kinerja	1 laporan			
					Alokasi Anggaran (Rp)	3.680.000	Alokasi Anggaran (Rp)	2.270.000			

LKPj 2022

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

No	Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
3)				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kinerja	4 dokumen	Kinerja	4 dokumen			
					Alokasi Anggaran (Rp)	5.300.000	Alokasi Anggaran (Rp)	5.290.000			
4)				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kinerja	12 dokumen	Kinerja	12 dokumen			
					Alokasi Anggaran (Rp)	2.000.000	Alokasi Anggaran (Rp)	2.000.000			
4				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kinerja	100%	Kinerja	97%			
					Alokasi Anggaran (Rp)	546.077.121	Alokasi Anggaran (Rp)	530.217.315			
1)				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kinerja	43 Unit	Kinerja	48 unit			
					Alokasi Anggaran (Rp)	2.600.000	Alokasi Anggaran (Rp)	2.600.000			
2)				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kinerja	56 unit	Kinerja	56 unit			
					Alokasi Anggaran (Rp)	161.000.000	Alokasi Anggaran (Rp)	161.000.000			
3)				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kinerja	919 unit	Kinerja	892 unit			
					Alokasi Anggaran (Rp)	33.937.121	Alokasi Anggaran (Rp)	33.763.121			

LKPj 2022

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
4)				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kinerja	55 meter, 22.600 lembar, 102 eksamplar	Kinerja	55 meter, 22.600 lembar, 102 eksamplar			
					Alokasi Anggaran (Rp)	11.540.000	Alokasi Anggaran (Rp)	11.540.000			
5)				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kinerja	12 eks, 7 kali	Kinerja	12 eks, 7 kali			
					Alokasi Anggaran (Rp)	30.000.000	Alokasi Anggaran (Rp)	18.520.000			
6)				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kinerja	725 dos	Kinerja	537 dos			
					Alokasi Anggaran (Rp)	15.000.000	Alokasi Anggaran (Rp)	11.112.000			
7)				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kinerja	10 Orang, 905 orang, 144 orang	Kinerja	10 Orang, 905 orang, 144 orang			
					Alokasi Anggaran (Rp)	292.000.000	Alokasi Anggaran (Rp)	291.682.194			
5				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kinerja	100%	Kinerja	89,12%			
					Alokasi Anggaran (Rp)	906.028.000	Alokasi Anggaran (Rp)	807.414.518			

LKPj 2022

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
1)				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kinerja	100%	Kinerja	78%			
					Alokasi Anggaran (Rp)	128.452.000	Alokasi Anggaran (Rp)	82.736.118			
2)				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kinerja	185 orang	Kinerja	173 orang			
					Alokasi Anggaran (Rp)	777.576.000	Alokasi Anggaran (Rp)	724.678.400			
6				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kinerja	60%	Kinerja	60%			
					Alokasi Anggaran (Rp)	348.422.000	Alokasi Anggaran (Rp)	335.329.880			
1)				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kinerja	1 unit	Kinerja	1 unit			
					Alokasi Anggaran (Rp)	38.630.000	Alokasi Anggaran (Rp)	38.437.710			
2)				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kinerja	27 unit	Kinerja	27 unit			
					Alokasi Anggaran (Rp)	250.000.000	Alokasi Anggaran (Rp)	238.126.170			

LKPj 2022

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

No	Urusan Pemerin tahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebija kan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
3)				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kinerja	26 unit	Kinerja	26 unit			
					Alokasi Anggaran (Rp)	18.042.000	Alokasi Anggaran (Rp)	17.032.000			
4)				Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kinerja	187 m2, 32 m2	Kinerja	187 m2, 32 m2			
					Alokasi Anggaran (Rp)	41.750.000	Alokasi Anggaran (Rp)	41.734.000			
II				PROGRAM PENYELENGGARA AN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kinerja	30,69%	Kinerja	25,23%			
					Alokasi Anggaran (Rp)	990.081.600	Alokasi Anggaran (Rp)	979.610.007			
1				Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kinerja	52%	Kinerja	51,01%			
					Alokasi Anggaran (Rp)	39.800.000	Alokasi Anggaran (Rp)	39.800.000			
1)				Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kinerja	1 Laporan	Kinerja	1 Laporan			
					Alokasi Anggaran (Rp)	39.800.000	Alokasi Anggaran (Rp)	39.800.000			
2				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kinerja	52%	Kinerja	51,27%			
					Alokasi Anggaran (Rp)	871.619.600	Alokasi Anggaran (Rp)	865.377.957			

LKPj 2022

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

No	Urusan Pemerin tahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebija kan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
1)				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kinerja	96 unit	Kinerja	96 unit			
					Alokasi Anggaran (Rp)	525.000.000	Alokasi Anggaran (Rp)	518.772.000			
2)				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kinerja	145 unit	Kinerja	145 unit			
					Alokasi Anggaran (Rp)	346.619.600	Alokasi Anggaran (Rp)	346.605.957			
3				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Kinerja	89,00%	Kinerja	83,83%			
					Alokasi Anggaran (Rp)	58.662.000	Alokasi Anggaran (Rp)	55.257.050			
1)				Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Kinerja	1 Unit	Kinerja	1 Unit			
					Alokasi Anggaran (Rp)	58.662.000	Alokasi Anggaran (Rp)	55.257.050			
5				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kinerja	52%	Kinerja	49,60%			
					Alokasi Anggaran (Rp)	20.000.000	Alokasi Anggaran (Rp)	19.175.000			
1)				Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Kinerja	12 kegiatan	Kinerja	12 kegiatan			
					Alokasi Anggaran (Rp)	20.000.000	Alokasi Anggaran (Rp)	19.175.000			

LKPj 2022

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
III				PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Kinerja	53,73%	Kinerja	41,38%			
					Alokasi Anggaran (Rp)	2.580.191.500	Alokasi Anggaran (Rp)	2.312.036.931			
2				Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kinerja	40,00%	Kinerja	21,56%			
					Alokasi Anggaran (Rp)	459.697.000	Alokasi Anggaran (Rp)	247.368.752			
1)				Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kinerja	2 dokumen, 1 dokumen	Kinerja	2 dokumen, 1 dokumen			
					Alokasi Anggaran (Rp)	459.697.000	Alokasi Anggaran (Rp)	247.368.752			
3				Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kinerja	60,66%	Kinerja	35,94%			
					Alokasi Anggaran (Rp)	2.120.494.500	Alokasi Anggaran (Rp)	2.064.668.179			

LKPj 2022

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

No	Urusan Pemerintah	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
1)				Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kinerja	1 Laporan	Kinerja	1 Laporan			
					Alokasi Anggaran (Rp)	888.547.000	Alokasi Anggaran (Rp)	888.160.600			
1)				Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kinerja	6 unit	Kinerja	6 unit			
					Alokasi Anggaran (Rp)	1.091.947.500	Alokasi Anggaran (Rp)	1.039.887.850			
2)				Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kinerja	94,56%	Kinerja	92,00%			
					Alokasi Anggaran (Rp)	140.000.000	Alokasi Anggaran (Rp)	136.619.729			

Capaian indikator kinerja serta rencana dan realisasi anggaran pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, merupakan program kegiatan yang bertujuan untuk memperlancar kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan, peningkatan sarana dan prasana aparatur yang memadai serta kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran. Indikator kinerja persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan dengan target kinerja sebesar 100% terealisasi 94,36% atau capaian sebesar 94,36%, sementara alokasi anggaran pada proram tersebut adalah Rp 6.121.673.121,- dan terealisasi sebesar Rp 5.929.439.553,- atau 96,85% dari alokasi anggaran dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah memiliki indikator capaian Meningkatnya nilai capaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan target 60 poin terealisasi 54,41 poin atau dengan capaian 90,68% serta total alokasi anggaran sebesar Rp 49.080.000,- dengan realisasi penggunaan anggaran Rp 44.725.000,- atau 91,13% dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja capaian Jumlah Dokumen Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun, dari 2 dokumen yang ditargetkan terealisasi 2 dokumen dengan capaian 100%, sementara total anggaran yang direncanakan sebesar Rp

3.620.000,- terealisasi Rp 3.580.000,- atau 98,90% dari total anggaran pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan indikator kinerja capaian adalah jumlah dokumen RKA pokok yang tersusun dari 1 dokumen yang ditargetkan terealisasi sebanyak 1 dokumen dengan capaian 100% sementara total anggaran yang direncanakan sebesar Rp 2.950.000,- terealisasi Rp 2.950.000,- atau 100% dari total anggaran pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan indikator kinerja capaian adalah Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang tersusun, dari 1 dokumen yang ditargetkan terealisasi sebanyak 1 dokumen dengan capaian 100%, sementara total anggaran yang direncanakan sebesar Rp 2.750.000,- terealisasi Rp 2.750.000,- atau 100% dari total anggaran pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan indikator kinerja capaian adalah Jumlah Dokumen DPA Pokok yang tersusun, dari 1 dokumen yang ditargetkan terealisasi sebanyak 1 dokumen dengan capaian 100%, sementara total anggaran yang direncanakan sebesar Rp 2.190.000,- terealisasi Rp 2.190.000,- atau 100% dari total anggaran pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan indikator kinerja capaian adalah Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang tersusun, dari 1 dokumen yang ditargetkan terealisasi sebanyak 1 dokumen dengan capaian 100%, sementara total anggaran yang direncanakan sebesar Rp 2.350.000,- terealisasi Rp 2.350.000,- atau 100% dari total anggaran pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.

- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan indikator kinerja capaian adalah Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun dan dilaporkan, dari 3 dokumen yang ditargetkan terealisasi sebanyak 3 dokumen dengan capaian 100%, sementara total anggaran yang direncanakan sebesar Rp 4.500.000,- terealisasi Rp 4.500.000,- atau 100% dari total anggaran pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja capaian adalah Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun dan dilaporkan, dari 1 dokumen yang ditargetkan terealisasi sebanyak 1 dokumen dengan capaian 100%, sementara total anggaran yang direncanakan sebesar Rp 30.720.100,- terealisasi Rp 26.405.000,- atau 85,95% dari total anggaran pelaksanaan sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah memiliki indikator capaian Tersusunnya laporan Keuangan dengan target 1 Laporan terealisasi 1 Laporan atau dengan capaian 100% serta total alokasi anggaran sebesar Rp 4.272.066.000,- dengan realisasi penggunaan anggaran Rp 4.211.752.840,- atau 98,59% dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator kinerja capaian adalah Jumlah ASN yang disediakan Tunjangan dan Gajinya, dari 61 orang yang ditargetkan terealisasi 54 Orang dengan capaian 88,52%, sementara total anggaran yang direncanakan sebesar Rp 4.261.086.000,- terealisasi Rp 4.202.192.840,- atau 98,62% dari total anggaran pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan indikator kinerja capaian adalah Jumlah Dokumen Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun, dari 1 dokumen yang ditargetkan terealisasi 1 dokumen dengan capaian 100%, sementara total anggaran yang direncanakan sebesar Rp 3.680.000,- terealisasi Rp 2.270.000,- atau 61,68% dari total anggaran pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan indikator kinerja capaian adalah Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun, dari 4 dokumen yang ditargetkan terealisasi 4 dokumen dengan capaian 100%, sementara total anggaran yang direncanakan sebesar Rp 5.300.000,- terealisasi Rp 5.290.000,- atau 99,81% dari total anggaran pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
- 4) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan indikator kinerja capaian adalah Jumlah Laporan RFK yang tersusun, dari 12 dokumen yang ditargetkan terealisasi 12 dokumen dengan capaian 100%, sementara total anggaran yang direncanakan sebesar Rp 2.000.000,- terealisasi Rp 2.000.000,- atau 100% dari total anggaran pelaksanaan sub kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah memiliki indikator capaian Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran dengan target 100% terealisasi 97,10% atau dengan capaian 97,10% serta total alokasi anggaran sebesar Rp 546.077.121,- dengan realisasi penggunaan

anggaran Rp 530.217.315,- atau 97,10% dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan indikator kinerja capaian adalah Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan, dari 43 Unit yang ditargetkan terealisasi 43 Unit dengan capaian 100%, sementara total anggaran yang direncanakan sebesar Rp 2.600.000,- terealisasi Rp 2.600.000,- atau 100% dari total anggaran pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indikator kinerja capaian adalah Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan, dari 56 unit yang ditargetkan terealisasi 56 unit dengan capaian 100%, sementara total anggaran yang direncanakan sebesar Rp 161.000.000,- terealisasi Rp 161.000.000,- atau 100% dari total anggaran pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan indikator kinerja capaian adalah Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan, dari 919 Unit yang ditargetkan terealisasi 892 unit dengan capaian 97,06%, sementara total anggaran yang direncanakan sebesar Rp 33.937.121,- terealisasi Rp 33.763.121,- atau 99,49% dari total anggaran pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan indikator kinerja capaian adalah Jumlah Spanduk dan Baliho yang tercetak, dari 55 meter yang ditargetkan terealisasi 55 meter dengan capaian 100%, Jumlah Foto Copy dari 22.600 lembar yang ditargetkan terealisasi 22.600 lembar dengan capaian 100% dan jumlah jilid dokumen dari 102 eksampelar yang

ditargetkan terealisasi 102 eksampelar dengan capaian 100%, sementara total anggaran yang direncanakan sebesar Rp 11.540.000,- terealisasi Rp 11.540.000,- atau 100% dari total anggaran pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

- 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan indikator kinerja capaian adalah jumlah langganan koran/majalah, dari 12 eksmaplar yang ditargetkan terealisasi 12 eksamplar dengan capaian 100%, dan jumlah iklan media cetak dan elektronik dari 7 kali yang ditargetkan teralisasi 7 kali dengan capaian 100%, sementara total anggaran yang direncanakan sebesar Rp 30.000.000,- terealisasi Rp 18.520.000,- atau 61,73% dari total anggaran pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
- 6) Fasilitas Kunjungan Tamu dengan indikator kinerja capaian adalah jumlah makanan dan minuman jamuan tamu yang disediakan, dari 725 dos yang ditargetkan terealisasi 537 dos dengan capaian 74,07%, sementara total anggaran yang direncanakan sebesar Rp 15.000.000,- terealisasi Rp 11.112.000,- atau 74,78% dari total anggaran pelaksanaan sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu.
- 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan indikator kinerja capaian adalah jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan, dari 905 orang yang ditargetkan terealisasi 905 orang dengan capaian 100%, jumlah pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dari 144 orang yang ditargetkan teralisasi 144 orang dengan capaian 100% dan jumlah pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dari 10 orang yang ditargetkan terealisasi 10 orang dengan capaian 100%, sementara total anggaran yang direncanakan sebesar Rp 292.000.000,- terealisasi Rp

291.682.194,- atau 99,89% dari total anggaran pelaksanaan sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki indikator capaian Persentase ketersediaan jasa yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan target 100% terealisasi 89,12% atau dengan capaian 89,12% dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 906.028.000,- dengan realisasi penggunaan anggaran Rp 807.414.518,- atau 89,12% dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan indikator kinerja capaian adalah Persentase Pemenuhan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik, dari 100% yang ditargetkan terealisasi 78,30% dengan capaian 78,30%, sementara total anggaran yang direncanakan sebesar Rp 128.452.000,- terealisasi Rp 82.736.118,- atau 64,41% dari total anggaran pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
- 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indikator kinerja capaian adalah Jumlah Penerima Honorarium Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan, dari 185 orang yang ditargetkan terealisasi 173 orang dengan capaian 93,51%, sementara total anggaran yang direncanakan sebesar Rp 777.576.000,- terealisasi Rp 724.678.400,- atau 93,20% dari total anggaran pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki indikator capaian Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah yang Dipelihara dengan target 60% terealisasi 60% atau dengan capaian 100% dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 348.422.000,- dengan realisasi penggunaan anggaran Rp 335.329.880,- atau 96,24% dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan indikator kinerja capaian adalah Jumlah kendaraan Dinas Jabatan yang ditingkatkan usia pakainya, dari 1 unit yang ditargetkan terealisasi 1 unit dengan capaian 100%, sementara total anggaran yang direncanakan sebesar Rp 38.630.000,- terealisasi Rp 38.437.710,- atau 99,50% dari total anggaran pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan indikator kinerja capaian adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang ditingkatkan usia pakainya, dari 27 unit yang ditargetkan terealisasi 27 unit dengan capaian 100%, sementara total anggaran yang direncanakan sebesar Rp 250.000.000,- terealisasi Rp 238.126.170,- atau 95,25% dari total anggaran pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan indikator kinerja capaian adalah Jumlah Peralatan dan Mesin yang Jumlah Kendaraan yang ditingkatkan usia pakainya, dari 26 unit yang ditargetkan terealisasi 26 unit dengan capaian 100%, sementara total anggaran yang direncanakan sebesar Rp 18.042.000,- terealisasi Rp 17.032.000,- atau 94,40% dari total

anggaran pelaksanaan sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan indikator kinerja capaian adalah Luas Gedung Kantor yang dipelihara, dari 187 m² yang ditargetkan terealisasi dengan capaian 187 m², dan Panjang Pagar Kantor yang dipelihara, dari 32 m yang ditargetkan terealisasi 32 m, sementara total anggaran yang direncanakan sebesar Rp 41.750.000,- terealisasi Rp 41.734.000,- atau 99,96% dari total anggaran pelaksanaan sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), merupakan program kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja lalu lintas Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki Indikator kinerja persentase kinerja lalu lintas kabupaten dengan target kinerja sebesar 30,69% terealisasi sebesar 25,23% dengan capaian 82,21%, sementara alokasi anggaran pada proram tersebut adalah Rp 990.081.600,- dan terealisasi sebesar Rp 979.610.007,- atau 98,94% dari alokasi anggaran dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

a. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota memiliki indikator capaian Persentase Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten yang ditetapkan dengan target 52% terealisasi 51,01% atau dengan capaian 98,10% dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 39.800.000,- dengan realisasi penggunaan anggaran Rp 39.800.000,- atau 100% dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja capaian adalah

Jumlah Data Fasilitas Perlengkapan Jalan/Keselamatan Jalan, Kepadatan Lalu Lintas dan Moda Transportasi yang tersusun, dari 1 laporan yang ditargetkan terealisasi 1 laporan dengan capaian 100%, sementara total anggaran yang direncanakan sebesar Rp 39.800.000,- terealisasi Rp 39.800.000,- atau 100% dari total anggaran pelaksanaan sub kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota.

b. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota memiliki indikator capaian Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten dengan target 52% terealisasi 51,27% atau dengan capaian 98,60% sementara total alokasi anggaran sebesar Rp 871.619.600,- dengan realisasi penggunaan anggaran Rp 865.377.957,- atau 99,28% dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja capaian adalah Jumlah Perlengkapan Jalan di Kabupaten/Kota, dari 96 unit yang ditargetkan terealisasi 96 unit dengan capaian 100%, sementara total anggaran yang direncanakan sebesar Rp 525.000.000,- terealisasi Rp 518.772.000,- atau 98,81% dari total anggaran pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.
- 2) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dengan indikator kinerja capaian adalah jumlah perlengkapan jalan di kabupaten/kota yang terpelihara, dari 145 unit yang ditargetkan terealisasi 145 unit dengan capaian 100%, sementara total anggaran yang direncanakan sebesar Rp 346.619.600,- terealisasi Rp 346.605.957,- atau 99,99% dari total anggaran pelaksanaan sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan.

c. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C memiliki indikator capaian Persentase Tingkat Keterpenuhan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C dengan target 89% terealisasi 83,83% atau dengan capaian 94,19% sementara total alokasi anggaran sebesar Rp 58.662.000,- dengan realisasi penggunaan anggaran Rp 55.257.050,- atau 94,20% dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal dengan indikator kinerja capaian adalah Jumlah sarana dan prasarana terminal yang dikembangkan, dari 1 unit yang ditargetkan terealisasi 1 unit dengan capaian 100%, sementara total anggaran yang direncanakan sebesar Rp 58.662.000,- terealisasi Rp 55.257.050,- atau 94,20% dari total anggaran pelaksanaan sub kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal.

d. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota memiliki indikator capaian Persentase Tingkat Keterpenuhan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten dengan target 52% terealisasi 49,60% atau dengan capaian 95,38% sementara total alokasi anggaran sebesar Rp 20.000.000,- dengan realisasi penggunaan anggaran Rp 19.175.000,- atau 95,88% dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja capaian adalah Jumlah Penertiban angkutan Lebaran, Natal, Tahun Baru, Peryaan Hari Besar Kenegaraan / Keagamaan dan Even Daerah yang dilaksanakan, dari 12 kegiatan yang ditargetkan terealisasi 12 kegiatan dengan capaian 100%, sementara total anggaran yang direncanakan

sebesar Rp 20.000.000,- dengan realisasi penggunaan anggaran Rp 19.175.000,- atau 95,88% dari total anggaran pelaksanaan sub kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota.

3. Program Pengelolaan Pelayaran

Program Pengelolaan Pelayaran, merupakan program kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan laut yang layak fungsi memiliki indikator kinerja Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang Layak Fungsi dengan terget sebesar 53,73% terealisasi sebesar 41,38% atau dengan capaian 77,01% serta alokasi anggaran pada program tersebut adalah Rp 2.580.191.500,- dan terealisasi sebesar Rp 2.312.036.931,- atau 89,61% dari alokasi anggaran dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

a. Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal

Kegiatan Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal memiliki indikator kinerja Persentase Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal dengan target 40% terealisasi 21,56% dengan capaian 53,90% sementara total alokasi anggaran sebesar Rp 459.697.000 dengan realisasi anggaran Rp 247.368.752,- dengan capaian sebesar 53,81%, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

1) Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal memiliki indikator kinerja Jumlah Dokumen FS Pelabuhan Pengumpan Lokal yang tersusun dengan target 2 dokumen terealisasi 2 dokumen dengan capaian 100% dan Jumlah Dokumen UKL-UPL Pelabuhan Pengumpan Lokal yang tersusun dengan target 1

dokumen terealisasi 1 dokumen sementara total alokasi anggaran yang direncanakan sebesar Rp 459.697.000 dengan realisasi anggaran Rp 247.368.752,- dengan capaian sebesar 53,81% dari total pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal.

b. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal

Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal memiliki indikator capaian Presentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang Layak Fungsi dengan target 60,66% terealisasi 35,94% atau dengan capaian 59,25% sementara total alokasi anggaran sebesar Rp 2.120.494.500,- dengan realisasi penggunaan anggaran Rp 2.064.668.179,- atau 97,37% dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal dengan indikator kinerja capaian adalah Tersedianya Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal, dari 1 laporan yang ditargetkan terealisasi 1 Laporan dengan capaian 100%, sementara total anggaran yang direncanakan sebesar Rp 888.547.000,- terealisasi Rp 888.160.600,- atau 99,96% dari total anggaran pelaksanaan sub kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal.
- 2) Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal dengan indikator kinerja capaian adalah Jumlah Pembangunan / Revitalisasi / Rehabilitasi / Penambahan Panjang Tambatan Perahu, dari 6 unit yang ditargetkan terealisasi 6 unit dengan capaian 100%, sementara total anggaran yang direncanakan sebesar Rp 1.091.947.500,- terealisasi Rp 1.039.887.850,- atau 95,23%

dari total anggaran pelaksanaan sub kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal.

- 3) Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal dengan indikator kinerja capaian adalah persentase keterpenuhan operasional UPTD Pengelolaan Fasilitas Pelayanan Darat Pelabuhan Pamatata, dan UPTD Pelabuhan Laut Lokal, dari 94,56% yang ditargetkan terealisasi 92% dengan capaian 97,65%, sementara total anggaran yang direncanakan sebesar Rp 140.000.000,- terealisasi Rp 136.619.729,- atau 97,59% dari total anggaran pelaksanaan sub kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal.

2.1.2. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai hasil pelaksanaan pembangunan sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan pelayanan fasilitas umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran atau indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah di tetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.1.2. Capaian Kinerja Berdasarkan IKU Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian
1	2	3	4	5	6	6	
1.	Meningkatnya Nilai SAKIP	Nilai SAKIP OPD	Poin	Capaian Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Tahun n-1	57,00 (CC)	54,41 (CC)	95,46
		- Perencanaan Kinerja	Poin	Capaian Nilai Perencanaan Kinerja Hasil Evaluasi SAKIP Tahun n-1	18,72	22,01	117,57
		- Pengukuran Kinerja	Poin	Capaian Nilai Pengukuran Kinerja	14,95	12,50	83,61

LKPj 2022

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian
1	2	3	4	5	6	6	
				Hasil Evaluasi SAKIP Tahun n-1			
		- Pelaporan Kinerja	Poin	Capaian Nilai Pelaporan Kinerja Hasil Evaluasi SAKIP Tahun n-1	10,80	9,21	85,28
		- Evaluasi Internal	Poin	Capaian Nilai Evaluasi Internal Hasil Evaluasi SAKIP Tahun n-1	4,26	3,33	78,17
		- Pencapaian Kinerja	Poin	Capaian Nilai Pencapaian Kinerja Hasil Evaluasi SAKIP Tahun n-1	8,27	7,35	88,88
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Layanan	%	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	60	58,13	96,88
3.	Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Laporan Keuangan OPD sesuai SAP		Predikat Hasil Laporan Keuangan Akhir Tahun pada Tahun n-1	Sesuai	Sesuai	Tercapai
4.	Meningkatnya Fasilitas Kepariwisata	Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten	%	Jumlah PAD Sektor Pariwisata dibagi Jumlah PAD Kabupaten dikali 100%	4,76	2,67	56,06
5.	Terwujudnya Kelancaran, Keamanan, dan Keselamatan bagi Pengguna Jalan dan Meningkatkan Transportasi Antar Wilayah	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengelolaan, Transportasi dan Perdagangan terhadap PDRB	%	Jumlah PAD Sektor Transportasi dibagi Jumlah PDRB dikali 100%	13,50	1,21	8,99

1. Indikator Nilai SAKIP OPD memiliki capaian kinerja 95,46% dengan realisasi 54,47 poin dari target 57,00 poin, diperoleh dari capaian hasil evaluasi SAKIP tahun 2021.
2. Indikator Perencanaan Kinerja memiliki capaian kinerja 117,57% dengan realisasi 22,01 poin dari target 18,72 poin, diperoleh dari capaian hasil evaluasi SAKIP tahun 2021.
3. Indikator Pengukuran Kinerja memiliki capaian kinerja 83,61% dengan realisasi 12,50 poin dari target 14,95 poin, diperoleh dari capaian hasil evaluasi SAKIP tahun 2021.

4. Indikator Pelaporan Kinerja memiliki capaian kinerja 85,28% dengan realisasi 9,21 poin dari target 10,80 poin, diperoleh dari capaian hasil evaluasi SAKIP tahun 2021.
5. Indikator Evaluasi Internal memiliki capaian kinerja 78,17% dengan realisasi 3,33 poin dari target 4,26 poin, diperoleh dari capaian hasil evaluasi SAKIP tahun 2021.
6. Indikator Pencapaian Kinerja memiliki capaian kinerja 88,88% dengan realisasi 7,35 poin dari target 8,27 poin, diperoleh dari capaian hasil evaluasi SAKIP tahun 2021.
7. Indikator Indeks Kepuasan Layanan memiliki capaian kinerja 58,13% dengan realisasi 96,88% dari target 60%, diperoleh dari hasil survey kepuasan masyarakat terhadap layanan pada UPT Terminal dan Perpustakaan yang diberikan pada tahun 2022. Pengguna layanan Terminal bonea yang menjadi responden dalam Survey Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Terminal Bonea tahun 2022 adalah sebanyak 50 orang

Hasil penilaian unsur :

	NILAI UNSUR PELAYANAN										
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	U11
Jumlah Nilai Per Unsur	118	122	120	117	118	113	120	115	112	110	115
Nilai unsur pelayanan	2.36	2.44	2.4	2.34	2.36	2.26	2.4	2.3	2.24	2.2	2.3
Nilai Rata-Rata Tertimbang Per Unsur	0.214	0.222	0.218	0.212	0.214	0.205	0.218	0.209	0.204	0.2	0.209
IKM	58.13										

Secara umum hasil survey Indeks Kepuasan Layanan pada penyelenggaraan pelayanan public UPT Terminal dan Perpustakaan tahun 2022 diperoleh Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 58,13. Apabila mengacu pada tabel Nilai Persepsi, interval IKM, interval Konversi, IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan, maka capaian tersebut berada pada interval nilai 43,76 – 62,50 dengan mutu pelayanan C yang

menunjukkan bahwa kinerja unit pelayanan UPT Terminal dan Perparkiran tahun 2022 tergolong dalam kategori Kurang Baik.

Tabel Nilai Persepsi, Nilai Interval IKM, Nilai Konversi IKM, Mutu Pelayanan, dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA PELAYANAN
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62, 50	C	Kurang Baik
3	2,51 – 3, 25	62, 51 – 81, 25	B	Baik
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100	A	Sangat Baik

8. Indikator Laporan Keuangan OPD sesuai SAP memiliki predikat tercapai dengan realisasi sesuai dengan SAP, capaian tersebut diperoleh dari predikat yang diperoleh atas hasil laporan keuangan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021.
9. Indikator Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten memiliki capaian kinerja 56,06% dengan realisasi 2,67% dari target 4,76%, diperoleh dari hasil perhitungan:

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten} &= \frac{\text{Jumlah PAD Sektor Pariwisata}}{\text{Jumlah PAD Kabupaten}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp 13.529.000}}{\text{Rp 50.695.462.462,63}} \times 100\% \\
 &= 2,67 \%
 \end{aligned}$$

10. Indikator Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengelolaan, Transportasi dan Perdagangan terhadap PDRB memiliki capaian kinerja 8,99% dengan realisasi 1,21% dari target 13,50%, diperoleh dari hasil perhitungan :

$$\begin{aligned}
 \text{Kapabilitas Bandara Aroeppala} &= \frac{\text{Jumlah PAD Sektor Transportasi}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp 830.006.020}}{\text{Rp 6.835.400.000.000}} \times 100\% \\
 &= 1,21\%
 \end{aligned}$$

2.1.3. Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan membutuhkan indikator kinerja sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu program, kegiatan, atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Indikator Kinerja merupakan unsur penting Akuntabilitas Kinerja yang harus dapat diukur secara objektif.

Sebagai salah satu perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar maka Dinas Perhubungan memiliki kewajiban untuk mewujudkan tujuan pembangunan Pemerintah Daerah sesuai yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar telah menetapkan beberapa indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar. Capaian kinerja tahun 2022 berdasarkan urusan perhubungan dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dalam RPJMD adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.3. Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
1	2	3	4	5	$6=(5/4) \times 100\%$	7
I	Urusan Perhubungan					
1	Indikator Kinerja yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD					
391	Persentase Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	%	30,69	25,00	81,46	

No.	Urusan/Perangkat Daerah/Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Ket.
1	2	3	4	5	$6=(5/4)\times 100\%$	7
392	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang Layak Fungsi	%	60,66	41,38	68,22	
	Persentase Capaian Kinerja	%	63,03	54,41	86,32	
	Persentase Capaian Kinerja Keuangan	%	83,00	95,14	114,63	
2	Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ SDGs					
1	Jumlah Bandara	Unit	1	1	100	
2	Jumlah Dermaga Penyeberangan	Unit	2	2	100	
3	Jumlah Pelabuhan Strategis	Unit	7	7	100	

Pada tahun 2022 capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan pelayanan urusan pemerintahan bidang perhubungan terdapat satu indikator yang memiliki realisasi capaian melebihi dari target, yaitu :

- 1) Indikator Persenyase Capaian Kinerja Keuangan dengan target kinerja 83,00% terealisasi sebesar 95,14% dengan capaian sebesar 114,63%. Capaian indikator kinerja tersebut diperoleh dari realisasi keuangan tahun 2022 yaitu sebesar Rp 9.221.086.491 dari rencana anggaran sebesar Rp 9.691.946.221. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja serapan penggunaan anggaran yang baik terbukti dengan capaian kinerja yang melebihi dari apa yang ditargetkan.

Selain indikator kinerja yang melebihi target terdapat pula indikator kinerja yang memenuhi target, yaitu :

- 1) Indikator kinerja Jumlah Bandara dari 1 (satu) unit yang ditargetkan terealisasi 1 (satu) unit atau dengan capaian 100%. Capaian ini sama dengan realisasi dari tahun-tahun sebelumnya karena bandara yang beroperasi di Kabupaten Kepulauan Selayar baru Bandara H. Aroeppala.

- 2) Indikator Jumlah Pelabuhan Penyeberangan dari 2 (dua) unit yang ditargetkan terealisasi 2 (dua) unit atau dengan capaian 100%. Capaian ini sama dengan realisasi dari tahun-tahun sebelumnya karena pelabuhan penyeberangan yang beroperasi di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah Pelabuhan Penyeberangan Pamatata dan Pelabuhan Penyeberangan Pattumbukang.
- 3) Indikator Jumlah Pelabuhan Strategis dari 7 (tujuh) unit yang ditargetkan terealisasi 7 (tujuh) unit atau dengan capaian 100%. Capaian ini sama dengan realisasi dari tahun-tahun sebelumnya dimana pelabuhan laut yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar antara lain Pelabuhan Laut Benteng, Pelabuhan Laut Pamatata, Pelabuhan Laut Jampea, Pelabuhan Laut Jinato, Pelabuhan Laut Kayuadi, Pelabuhan Laut Bonerate, dan Pelabuhan Laut Kalaotoa.

Sementara indikator kinerja yang belum mencapai target yang telah direncanakan adalah :

- 1) Indikator Persentase Kinerja Lalu Lintas Kabupaten dari 30,69% yang ditargetkan terealisasi sebesar 25,23% dengan capaian sebesar 81,46%. Kinerja lalu lintas ditentukan dari nilai Derajat kejenuhan pada suatu kondisi jalan tertentu terkait dengan geometrik, arus lalu lintas, dan lingkungan jalan. Dari capaian tersebut dapat diketahui bahwa kinerja lalu lintas Kabupaten Kepulauan Selayar masih tergolong baik dan lancar dengan arus lalu lintas pada jam sibuk sebanyak 926 kend/jam atau 354 skr/jam jika diubah dalam satuan kendaraan ringan serta kelas hambatan pada jalan yang disurvei termasuk kelas sangat rendah dengan frekuensi bobot kejadian <100 dengan kondisi jalan berupa kawasan permukiman hampir tidak ada kegiatan. Selain itu, nilai kapasitas jalan Kabupten Kepulauan Selayar berdasarkan jalan yang disurvei dengan kategori tersibuk adalah sebesar 1.403 skr/jam. Faktor yang menjadi

penghambat tercapainya target kinerja lalu lintas kabupaten salah satunya adalah banyaknya kendaraan yang sering parkir di bahu jalan dan material bangunan yang tertimbun pada bahu jalan bahkan sampai ke badan jalan sehingga pada jam sibuk seperti pada jam masuk dan pulang sekolah menyebabkan lalu lintas kendaraan agak terhambat.

- 2) Indikator Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang Layak Fungsi dari 60,66% yang ditargetkan terealisasi sebesar 41,38% dengan capaian sebesar 68,22%. Capaian indikator kinerja ini diperoleh, sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang Layak Fungsi} &= \frac{\text{Jumlah Tambatan Perahu layak fungsi}}{\text{Jumlah Keseluruhan Tambatan Perahu}} \times 100\% \\ &= \frac{24 \text{ Unit}}{58 \text{ Unit}} \times 100\% \\ &= 41,38\% \end{aligned}$$

Tambatan perahu pada tahun 2022, dimana dari total 58 unit tambatan perahu terdapat 24 unit tambatan perahu dalam kondisi layak fungsi dan sebanyak 34 unit tambatan perahu dalam kondisi rusak. Salah satu faktor penghambat capaian indikator kinerja tersebut adalah terjadinya bencana alam yang mengakibatkan kerusakan pada tambatan perahu terutama yang ada di wilayah kepulauan serta terbatasnya anggaran yang ada.

- 3) Indikator Persentase Capaian Kinerja dari 63,03% yang ditargetkan terealisasi sebesar 54,41% dengan capaian sebesar 86,32%. Capaian indikator kinerja ini diperoleh dari hasil evaluasi SAKIP tahun 2021 dimana salah satu faktor penghambat tercapainya target indikator kinerja tersebut adalah :
- a) Terdapat beberapa dokumen SAKIP yang belum di upload dan dipublikasikan secara memadai karena belum adanya

website yang dimiliki sendiri, anantara lain : Renstra, Perjanjian Kinerja (PK), IKU, dan Laporan Kinerja;

- b) Rencana Kerja Tahunan/Rencana Kerja belum dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran.
- c) Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi belum dilakukan secara berkala;
- d) Pengukuran kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi informasi;
- e) Hasil evaluasi rencana aksi belum ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata;
- f) Hasil evaluasi belum dikomunikasikan dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan; dan
- g) Pencapaian kinerja belum dapat dibandingkan pencapaian kinerja T.A. 2020 dengan T.A. 2021.

Dari permasalahan yang dihadapi dan menjadi faktor penghambat pelaksanaan dan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dibutuhkan upaya dan tindakan yang harus diambil sebagai pemecahan permasalahan tersebut, antara lain :

- 1) Perlunya penertiban parkir kendaraan pada bahu jalan terutama pada jalan dalam kawasan pertokoan dan gedung sekolah;
- 2) Perlunya pemasangan lampu penerangan jalan umum pada jalan yang rentan terjadi kecelakaan serta perlunya pemeliharaan terhadap fasilitas keselamatan jalan seperti rambu-rambu lalu lintas, LPJU, dan Traffic Light;
- 3) Perlunya anggaran yang memadai untuk rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan laut yang membutuhkan perbaikan sehingga layak untuk difungsikan;
- 4) Perlu adanya website tersendiri sebagai media publikasi informasi secara online, seperti publikasi dokumen perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja serta

publikasi informasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan;

- 5) Perlu pengumpulan data kinerja terhadap pelaksanaan rencana aksi serta menindaklanjuti hasil evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi.

2.1.4. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang Sudah Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam menjalankan urusan pemerintahan guna mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan diperlukan kesesuaian antara tingkat penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan besaran capaian terget kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan terget kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 tampak pada tabel berikut :

Tabel 2.1.4. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang Sudah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022

No.	Urusan Pemerintahan Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)	Jumlah Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan (%)
1	2	3	4	5=3-4	6=(4/3)*100	7	8	9	10		
1	Urusan Perhubungan										
.	Dinas Perhubungan	9.691.946.221	9.221.086.491	470.859.730	95,14	3	74,76	11	89,18	39	98,81

Dari tabel di atas nampak rata-rata tingkat ketercapaian indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja belum mencapai apa yang telah direncanakan. Dari pencapaian kinerja tersebut didukung dengan penggunaan anggaran dengan realisasi penggunaan anggaran yang termasuk dalam kategori baik dengan realisasi sebesar 95,14%.

Dari 3 (tiga) indikator kinerja program memiliki rata-rata tingkat ketercapaian indikator kinerja program sebesar 74,76% dengan realisasi capaian, yaitu :

- 1) Indikator kinerja Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan dari target 100% teralisasi 94,36% dengan capaian sebesar 94,36%. Pencapaian kinerja program tersebut didukung dengan penggunaan anggaran sebesar Rp 2.929.439.553 dari rencana anggaran sebesar Rp 6.121.673.121 dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar 98,86%.
- 2) Indikator Kinerja Lalu lintas Kabupaten dari target 30,69% teralisasi 25% dengan capaian sebesar 81,46%. Pencapaian kinerja program tersebut didukung dengan penggunaan anggaran sebesar Rp 976.610.007 dari rencana anggaran sebesar Rp 990.081.600 dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar 98,94%.
- 3) Indikator Kinerja Presentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut yang layak fungsi dari target 53,73% teralisasi 41,34% dengan capaian sebesar 76,94%. Pencapaian kinerja program tersebut didukung dengan penggunaan anggaran sebesar Rp 2.312.036.931 dari rencana anggaran sebesar Rp 2.580.191.500 dengan realisasi penggunaan anggaran sebesar 89,61%.

Selain indikator kinerja program pelaksanaan urusan perhubungan juga didukung pelaksanaan kegiatan dengan jumlah

indikator kinerja sebanyak 11 indikator dengan rata-rata capaian sebesar 89,18%. Selain itu, pelaksanaan urusan perhubungan didukung pula dengan pelaksanaan sub kegiatan dengan jumlah indikator sebanyak 39 indikator dan rata-rata capaian kinerja sebesar 98,81%

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan urusan perhubungan antara lain :

- 1) Belum adanya media website sendiri sehingga informasi dan dokumen tidak dapat dipublikasikan secara online yang mampu diakses oleh masyarakat atau lembaga yang membutuhkan;
- 2) Masih banyaknya masyarakat pengguna jalan yang belum sadar akan tertib parkir pada bahu jalan serta terbatasnya tenaga juru parkir yang dimiliki sehingga mengganggu pengendara lain terutama pada jam-jam sibuk;
- 3) Terbatasnya alokasi anggaran yang dapat dimanfaatkan untuk pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana perhubungan sehingga dapat berfungsi dan dimanfaatkan kembali dengan baik;
- 4) Tidak adanya alokasi anggaran dalam rangka penyediaan alat uji kendaraan yang sesuai standar sehingga seluruh angkutan yang ada tidak dapat dilakukan uji secara berkala karena adanya surat Dirjen. Perhubungan Darat Nomor : AJ.503/33/7/DRJD/2020, tanggal 17 November 2020, perihal Penggunaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor. Dimana UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar belum terakreditasi dan belum mengimplementasikan penerbitan Bukti Lulus Uji elektronik (BLUe) berupa Kartu Uji dan Tanda Uji serta belum dilengkapi dengan peralatan utama uji berkala kendaraan bermotor sesuai standar kebutuhan sebagaimana

dijelaskan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor Pasal 16 ayat (2).

2.1.5. Inovasi

Pada tahun 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar menyelenggarakan satu program inovasi yaitu “Selayar Mudik Gratis Tahun 2022 M/1443 H” yang diperuntukkan bagi Mahasiswa dan Pelajar.

Tabel 2.1.5 Program Inovasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022

No	Uraian inovasi	Maksud dan tujuan inovasi	Hasil/ manfaat	Ket.
1	2	3	4	5
1	Selayar Mudik Gratis Tahun 2022 / 1443 H	Membantu dan memfasilitasi mahasiswa dan pelajar yang akan mudik sehingga menekan angka kecelakaan lalu lintas saat arus mudik lebaran	Mahasiswa dan pelajar dapat sampai ditujuan dengan selamat.	Kerjasama dengan BUMN/ BUMD

Tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan program Selayar Mudik Gratis ini adalah dapat membantu dan memfasilitasi mahasiswa dan pelajar yang akan mudik sehingga mampu menekan angka kecelakaan lalu lintas saat arus mudik lebaran dengan menggunakan moda transportasi yang lebih aman dan nyaman sehingga diharapkan dapat membantu para mahasiswa dan pelajar untuk sampai di tujuan dengan selamat.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui Dinas Perhubungan bekerjasama dengan beberapa Badan Usaha Milik Negara/Daerah antara lain adalah :

1. PT. Bank Sulselbar Cabang Selayar
2. PT. Pelindo IV Cabang Makassar
3. PT. Bank BRI Cabang Selayar
4. PT. Bank BNI Cabang Selayar
5. PT. Bank Perkreditan Rakyat PesisirTanadoang
6. PT. ASDP Cabang Selayar

Disamping partisipasi beberapa Badan Usaha Milik Negara/Daerah, pelaksanaan kegiatan ini dibantu dengan membentuk Tim Kordinator sebagai perwakilan dari kalangan mahasiswa, yaitu Saudara Awis dan Saudara Muhammad Farhan yang bertugas menyebarluaskan informasi melalui Media Sosial dan Persuratan kebeberapa kampus-kampus yang ada di Makassar serta membantu mengidentifikasi dan mendata Mahasiswa dan Pelajar calon pemudik.

Pelaksanaan program Selayar Mudik Gratis tahun 2022 ini dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali pemberangkatan yaitu pada tanggal 27 dan 29 April 2022. Pemberangkatan dilakukan dengan menggunakan 4 (empat) armada bus dari Terminal Mallengkeri Makassar menuju Pelabuhan Penyeberangan Bira yang selanjutnya menggunakan armada kapal Ferry menuju Pelabuhan Penyeberangan Pamatata dan berakhir di Terminal Benteng Kepulauan Selayar sebagai tujuan akhir.

Pemberangkatan perdana program Selayar Mudik Gratis tahun 2022 pada tanggal 27 April 2022 tepat pada pukul 22.00 Wita dilepas secara langsung oleh pimpinan Bank Sulselbar Cabang Selayar bersama Kepala Dinas Perhubungan dengan menggunakan 3 (tiga) armada bus serta jumlah mahasiswa dan pelajar sebanyak 90 orang. Para mahasiswa dan pelajar selaku pemudik masing-masing mendapatkan nasi dos untuk makan sahur. Rombongan peserta Selayar Mudik Gratis ini tiba di Terminal Benteng pada pukul 13.00 Wita. Sementara, untuk pemberangkatan kedua pada

tanggal 29 April 2022 pukul 22.00 Wita dilaksanakan dengan memberangkatkan 1 (satu) armada bus dengan jumlah peserta mudik sebanyak 47 orang mahasiswa dan pelajar.

2.1.6. Prestasi/Penghargaan

Pada tahun 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tidak mendapatkan penghargaan.

No.	Nama Penghargaan	Tingkat				Diselenggarakan oleh/ Penyelenggara	Ket.
		Internasional	Nasional	Provinsi	Kabupaten		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Kebijakan Daerah (Perda, Perbub, dan Keputusan Bupati) yang Diinisiasi Oleh Dinas Perhubungan dan Ditetapkan Oleh Kepala Daerah

Pada tahun 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar menginisiasi penetapan kebijakan daerah berupa perubahan Peraturan Bupati, sebagai berikut :

Tabel 2.2.1 Kebijakan Daerah (Perda, Perbub, dan Keputusan Bupati) yang diinisiasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum		Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan	Ket.
		Nomor/ Tanggal Pengesahan	Tentang		
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Angkutan	Perbub Nomor 35 Tahun 2022/ tanggal 14 Oktober 2022	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2021 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan	Penyesuaian tarif angkutan penyeberangan sehingga tidak terjadi kenaikan harga BBM sehingga tidak terjadi kenaikan harga secara sepihak yang dapat merugikan pengguna jasa angkutan penyeberangan	

Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 35 Tahun 2022 merupakan perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2021 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana sebelumnya telah diubah dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022. Beberapa ketentuan dalam Perbub Nomor 67 Tahun 2021 yang diubah dalam Perbub Nomor 35 tahun 2022 adalah ketentuan ayat (2) pasal 5 dan ketentuan pasal 11. Perubahan peraturan bupati ini didasari dengan adanya kenaikan harga BBM serta permohonan penyesuaian tarif angkutan penyeberangan di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar yang didasari pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.66 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan bahwa tarif angkutan penyeberangan untuk tarif ekonomi ditetapkan oleh Bupati untuk lintas penyeberangan dalam kabupaten.

Dengan adanya perubahan Peraturan Bupati tentang tarif angkutan penyeberangan ini diharapkan tidak terjadi keresahan di masyarakat terutama pengguna jasa angkutan penyeberangan karena adanya kenaikan tarif angkutan umum secara sepihak sebagai akibat adanya kenaikan harga bahan bakar minyak.

2.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2021

Sesuai dengan Surat Bupati Kepulauan Selayar nomor : 066/130/VIII/2022/Pemr tanggal 5 Agustus 2022 perihal Tindak Lanjut Rekomendaasi DPRD atas LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2021 yang menindaklanjuti Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomot 7 Tahun 2022 tentang Penetapan Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2021, maka rekomendasi DPRD Kabupaten Kepulauan

Selayar terhadap Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut :

Tabel 2.3.1 Tindak Lanjut Atas Rekomendasi DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2021

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1.	Memberikan perhatian lebih kepada tambatan perahu yang ada baik di wilayah daratan maupun wilayah kepulauan terutama tambatan perahu yang membutuhkan rehabilitasi, mengingat pentingnya demi kelancaran proses bongkar muat masyarakat yang ada di pedesaan.	Tahun Anggaran 2022 dialokasikan: 1) Pembangunan Tambatan Perahu Labuang Nipayya Kec. Bontomatene Rp 200.000.000 2) Pembangunan Tambatan Perahu Pulau Polassi Kec. Bontomatene Rp 200.000.000 3) Penambahan Panjang/Rehabilitasi Tambatan Perahu Ujung Kec. Pasimasunggu Timur Rp 200.000.000 4) Penambahan panjang Tambatan Perahu Desa Tambolongan Kec. Bontosikuyu Rp 200.000.000 5) Penambahan Panjang Tambatan Perahu Desa Laiyolo Kec. Bontosikuyu Rp 150.000.000 6) Penambahan Panjang/Rehabilitasi Tambatan Perahu Desa Nyiur Indah Kec. Takabonerate Rp 100.000.000	1) Mempermudah bongkar muat lalu lintas angkutan laut antarwilayah baik daratan maupun kepulauan. 2) Menambah usia pakai sehingga tambatan perahu dapat berfungsi dengan baik.
2.	Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan agar pajak yang diperoleh dapat dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan pengadaan Lampu Penerang Jalan Umum (LPJU) karena masih banyak wilayah di Kabupaten Kepulauan Selayar baik di perkotaan maupun di Pedesaan yang	Tahun Anggaran 2022 dialokasikan: 1) Pengadaan LPJU Tenaga Surya di Desa Onto Kec. Bontomatene sebanyak 6 (enam) unit dengan nilai anggaran Rp 100.000.000 2) Pengadaan LPJU Tenaga Surya di Dusun Tanaberu Kec. Bontomatene sebanyak 7 (tujuh) unit	Menambah penerangan pada jalan dengan kondisi yang rawan terjadi kecelakaan terutama pada malam hari.

LKPj 2022

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
	belum memiliki LPJU mengingat penerimaan daerah yang bersumber dari pajak penerangan jalan setiap tahunnya terus meningkat.	dengan nilai anggaran Rp 125.000.000	

Dari hasil LKPj Bupati tahun anggaran 2021 menghaikan 2 (poin) rekomendasi DPRD, yaitu 1) Memberikan perhatian pada tambatan perahu baik di wilayah daratan maupun wilayah kepulauan terutama yang membutuhkan pemeliharaan/rehabilitasi, dan 2) Pengadaan dan pemasangan LPJU baik di perkotaan maupun di pedesaan. Sebagai bentuk tindak lanjut dari rekomendasi tersebut, maka Dinas Perhubungan pada tahun anggaran 2022 mengalokasikan anggaran pada kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal sub kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal sebesar Rp 1.091.947.500 untuk pembangunan perahu sebanyak 2 (dua) unit, yaitu Pembangunan Tambatan Perahu Labuang Nipayya Kec. Bontomatene dan Pembangunan Tambatan Perahu Pulau Polassi Kec. Bontomatene selain itu dianggarkan pula untuk penambahan panjang/rehabilitasi tambatan perahu sebanyak 4 (empat) unit, yaitu Penambahan panjang/rehabilitasi tambatan perahu Ujung Kec. Pasimasunggu Timur, Penambahan panjang Tambatan Perahu Desa Tambolongan Kec. Bontosikuyu, Penambahan Panjang Tambatan Perahu Desa Laiyolo Kec. Bontosikuyu, dan Penambahan Panjang/Rehabilitasi Tambatan Perahu Desa Nyiur Indah Kec. Takabonerate.

Pada tahun anggaran 2022 dialokasikan pula anggaran pada kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

sub kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota sebesar Rp 225.000.000 untuk Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Tenaga Surya di Desa Onto sebanyak 6 (enam) unit dan Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Tenaga Surya di Dusun Tanaberu sebanyak 7 (tujuh) unit. Selain itu, dialokasikan pula anggaran pada Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan untuk Belanja Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PLJU) Tenaga Surya sebanyak 44 unit sebesar Rp 198.000.000 dan Belanja Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (PLJU) Tenaga Listrik sebanyak 51 unit sebesar Rp 102.000.000.

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN
PENUGASAN

3.1. Tugas Pembantuan dan Penugasan yang Dilaksanakan

Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 tidak melaksanakan tugas pembantuan dan penugasan baik dari pusat maupun dari provinsi sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

3.2. Hambatan-Hambatan

**BAB IV
PENUTUP**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 merupakan laporan hasil capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan selama tahun anggaran 2022. LKPJ Dinas Perhubungan tahun 2022 ini merupakan rangkaian pelaksanaan pembangunan yang diukur berdasarkan capaian misi, tujuan dan sasaran serta rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan tahun 2022. LKPJ ini juga disusun sesuai dengan sistematika yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Dari hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaporkan pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022, dapat disimpulkan pada umumnya berjalan dengan baik sesuai dengan hasil capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari itikad baik, kerja keras, kreativitas, dan inovasi dari semua stakeholder terutama lingkungan internal yang memiliki keterkaitan fungsi sesuai dengan bidang tugas dan urusan masing-masing.

Hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah dicapai pada tahun 2022, tentunya masih perlu untuk ditingkatkan karena akan menjadi bahan dasar penyusunan target pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam perencanaan tahun berikutnya. Terhadap berbagai kekurangan, kelemahan dan permasalahan yang ditemukan akan dilakukan evaluasi untuk dapat dijadikan acuan bagi perbaikan

LKPj 2022

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

penyelenggaraan tugas dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Semoga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 ini dapat menjadi bahan bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan catatan-catatan sebagai bahan dalam rangka penyempurnaan dan perbaikan pembangunan khususnya di Bidang Perhubungan ke depan guna mewujudkan “Kepulauan Selayar Sebagai Bandar Maritim Kawasan Indonesia Timur”.

Benteng, 30 Januari 2023

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**



Drs. SUARDI

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19670705 199403 1 020